



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON  
Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/10/2021**

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **tujuh** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul **16:44** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (selanjutnya disebut Yayasan HAKA), dalam hal ini diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara), selaku Pemohon**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Agustus 2021 memberi kuasa kepada Harli, S.H., M.T, dkk  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Jumat** tanggal **delapan** bulan **Oktober** tahun **dua ribu dua puluh satu** pukul **11:58** WIB WIB.

**Panitera  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000  
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)

Lampiran:  
AP3 Nomor 46/PUU/PAN.MK/AP3/10/2021

## DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh (selanjutnya disebut Yayasan HAKA), dalam hal ini diwakili oleh Farwiza (Ketua Pengurus), Badrul Irfan (Sekretaris), dan Kurnia Asni (Bendahara), selaku Pemohon

Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

No APPP : 46/PUU/PAN.MK/AP3/10/2021

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan	1	
7	P-2. Akta Nomor 03 Tanggal 4 Februari 2013 Tentang Yayasan HAKA yang dibuat dihadapan Ali Agunawan Istio, S.H - Notaris di Kota Banda Aceh	1	
8	P-3 Akta Nomor 20 Tanggal 14 Mei 2013 Tentang Perubahan Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh	1	
9	P-4 Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3737.AH.01.04.Tahun 2013, tertanggal 14 Mei 2018	1	
10	P-5 Akta Nomor 02 Tanggal 08 Juni 2018 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat dihadapan Ernalita, S.H – Notaris di Kota Banda Aceh	1	
11	P-6 Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-AH.01.06-0009800 tanggal 09 Juni 2018	1	
12	P-7 NPWP Yayasan HAKA: 03.286.515.6-101.000 terdaftar 19 Februari 2013	1	
13	KTP An. Farwiza	1	
14	P-9 KTP An. Badrul Irfan	1	
15	P-10 KTP An. Kurnia Asni	1	
16	P-11 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013	1	
17	P-12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja	1	
18	P-13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	
19	P-14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1	

20	P-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang UU MK	1	
21	P-16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076	1	
22	P-17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1	
23	P-18 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang	1	
24	P-19 C S T Kansil dan Christine S T Kansil dalam "Kamus Istilah Aneka Hukum", Cetakan Pertama (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000	1	
25	P-20 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005	1	
26	P-21 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007	1	
27	P-22 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014	1	
28	P-23 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009	1	
29	P-24 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003	1	
30	P-25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014)	1	
31	P-26 Surat Setoran Pajak Tahunan tanggal penyampaian laporan terakhir bulan Mei tahun 2021	1	
32	P-27 Bukti penerimaan elektronik Pajak No : 23156706464213020902, tanggal penyampaian 20 Juli 2021	1	
33	P-28 Kegiatan kerja-kerja Advokasi Perlindungan Hutan dan Keaneka Ragaman Hayati Khas Sumatera di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	1	
34	P-29 Diundang DPR RI dalam memberi masukan mengenai UU masyarakat Hukum Adat dan konflik-konflik sumber daya alam di Provinsi Pembahasan RUU MA Sidang II Tahun 2018-2019 .	1	
35	P-30 Kerjasama Yayasan HaKA dan Universitas Syiah Kulala Taken MoU dalam upaya melakukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai Kawasan Ekosistem Leuser di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam	1	
36	P-31 Melakukan Pembuatan Pendampingan Penyusunan Rancangan Qanun Pengelolaan Satwa Liar di Provinsi Aceh	1	

37	P-32 Putusan Tata Usaha Negara Nomor: 04/G/LH/2018/PTUN.BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh	1	
38	P-33 Putusan Perkara Perdata Nomor: 1/Pdt.Bth/2019/PN-Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue	1	
39	P-34 Putusan Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.Bth/2019/PN-Skm Pengadilan Negeri Suka Makmue	1	
40	P-35 Putusan Perkara Perdata Nomor: 7/Pdt.Bth/2019/PN-Skm di Pengadilan Negeri Suka Makmue	1	
41	P-36 Glucker, Anne N.; Driessen, Peter P.J.; Kolhoff, Arend; Runhaar, Hens A.C. (2013). Public participation in environmental impact assessment: why, who and how?. dalam Jurnal Environmental Impact Assessment Review, 43(), 104–111. doi:10.1016/j.eiar.2013.06.003	1	
42	P-37 Key Messages on Human Rights and Climate Change. (n.d.). diunduh dari , COP21.pdf (ohchr.org)	1	
43	P-38 Shelton, D. (2002.). Human Rights, Health & Environmental Protection: Linkages in Law & Practice A Background Paper for the World Health Organization	1	
44	P-39 PP No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	
45	P-40 Endangered Species Species Act of 1973	1	
46	P-41 ??Hiram G. HILL, Jr. et al. vs. TENNESSEE VALLEY AUTHORITY. Civ. No. 3-76-48.	1	
47	P-42 Hiram G. Hill, Jr., Zygmunt J.b. Plater, Donald S. Cohen,the Audubon Council of Tennessee, Inc., and Theassociation of Southeastern Biologists,plaintiffs-appellants, v. Tennessee Valley Authority, Defendants-appellees, 549 F.2d 1064 (6th Cir. 1977	1	
48	P-43 United States Supreme Court, TVA v. HILL(1978) No. 76-1701 Argued: April 18, 1978 Decided: June 15, 1978	1	
49	P-44 Declaration on the Right to Development yang diadopsi oleh General Assembly Resolution 41/128,	1	
50	P-45 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia	1	
51	P-46 Development as Freedom. Oxford University Press. Important and influential synthesis of Sen's work on human development and the Capability Approach, oi diterbitkan tahun 1999	1	
52	P-47 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya	1	
53	P-48 UU No 12 Tahun Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik	1	
54	P-49 Komite PBB tentang HAM dalam General Comment No 29 on Article 4 of ICCPR	1	

55	P-50 Rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia atas Hasil Pembahasan MPR RI terhadap Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI oleh Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002, dibuat dalam TAP MPRI RI Nomor VI/MPR/2002 Tentang Rekomendasi atas Laporan pelaksanaan putusan MPR RI oleh Presiden, DPA, DPR, BPK, MA Pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2002	1	
56	P-51 Laporan riset Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati   Diponegoro Law Journal. (2016). Pertanggungjawaban Perdata PT. Kalista Alam atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Dalam Pembukaan Lahan Kebun Kelapa Sawit Studi PUT No 12/PDT.G/2012/PN.MBO   Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati   Diponegoro Law Journal. . Retrieved September 24, 2021	1	
57	P-52 Zulfikar, M. N., & Aminah, A. (2020). Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan dalam Bidang Pengelolaan Kawasan Rawa Tripa. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 22(2), 241–262.	1	
58	P-53 Laporan Riset Elsa Nastiti Dama Yanti, K., Devana Aribowo Putri, Y., Alfiana Syahar, R., Nolan Sitompul, B., Satrio Gumelar, R., Putra Tritama, A., Marcopolo, J., & Nur Wajihan, K. (2017.). Efektivitas Putusan Pengadilan Pidana dan Perdata	1	
59	P-54 Rasyadi, A., Pengelolaan, M., Perairan, S., & Pertanian Bogor, I. (n.d.). Kajian Inventarisasi Dampak Lubang Galian Bekas Tambang (void) Batu Bara di Kalimantan Timur terhadap Dinamika Ekosistem Peraira	1	
60	P-55 Sederet Warisan Persoalan Rio Tinto di Kutai Barat	1	
61	P-56 Rachmawatie, R., Rachmawatie, R., Hidayah, Z., & Abida, I. W. (2009). Analisis Konsentrasi Merkuri (Hg) Dan Cadmium (Cd) Di Muara Sungai Porong Sebagai Area Buangan Limbah Lumpur Lapindo. Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology, 2(2), 125–134	1	
62	P-57 Ainiyah, S. D., Lestri, I., & Andini, A. (2018). Hubungan Antara Kadar Besi (Fe) Air Tambak terhadap Kadar Besi (Fe) Pada Daging Ikan Nila (Oreochromis niloticus) DAN IKAN BANDENG (Chanos chanos) di Kecamatan Jabon Sidoarjo. Jurnal SainHealth, 2(2), 21–28.	1	

**Panitera,  
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.